

DAFTAR PUSTAKA

- Adhityahadi, Vito. (2018, Maret 5). Stages of Procurement of Goods and Service Utilizing Village Funds. Diakses dari <http://www.en.netralnews.com/news/>
- Amemba et al. (2013). Challenges Affecting Public Procurement Performance Process in Kenya. *International Journal of Research in Management*. ISSN 2249-5908 Issues 3 Vol. 4. Diakses dari <https://iiste.org/Journals/index.php/>
- Azam. (2017, September 16). Serapan Dana Desa Tahap I Di Kota Batu Masih Minim, Kenapa? *Malang Today*. Diakses dari <https://malangtoday.net/>
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyumas. (2017). *Kecamatan Ajibarang Dalam Angka 2017*. Banyumas: Penulis. Diakses dari <https://banyumaskab.bps.go.id>
- Chigudu, Daniel. (2014). Public Procurement in Zimbabwe: Issues and Challenges. *Journal of Governance and Regulation Volume 3, Issue 4*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/>
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed)*. United States: SAGE Publications, Inc.
- Dwi Wedhaswary, Inggried. (2014, Mei 21). "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/>
- Fauziah, Nisa. (2016, November 8). Potensi Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. Diakses dari <http://jdih.bppt.go.id/>
- Hardi, Mohamad. (2016, April). Resiko/ Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa. Diakses dari <http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/04/>
- Hui et al. (2012). Procurement Issues in Malaysia. *International Journal of Public Sector Management, Vol. 24 No. 6, 2011, pp. 567-593*. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2162204/
- Ida. (2015, Juni 15). Cilongok Jadi Kecamatan Termiskin. Diakses dari <http://radarbanyumas.co.id/cilongok-jadi-kecamatan-termiskin/>
- Iskandar, A. Ika. (2013). Analisis Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Magister Tesis). Diakses dari: [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334115-T32543-A.Ika Iskandar.pdf/](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334115-T32543-A.Ika%20Iskandar.pdf/)
- Joeliono. (2015). Penguatan Otonomi Desa Menuju Kemandirian Desa. Pemerintah Kabupaten Banyumas. Diakses dari <https://www.banyumaskab.go.id/read/>

- Juliani dan Sholihin. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/ Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.11 No.2*. Diakses dari <http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/293/>
- Kementerian Keuangan. (2017). Buku Pintar Dana Desa 2018 Dengan Tema Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan. DKI Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf/>
- Kementerian Keuangan. (2017). Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 (Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017) Redtop Hotel And Convention Center, 21-24 November 2016. DKI Jakarta: Penulis. Diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/>
- Kurniawan, David. (2017, Juli 12). 7 Desa Salah Bikin Laporan Penyerapan. Jateng Pos. Diakses dari: <http://www.jatengpos.com/2017/07/dana-des-7-desalah-bikin-laporan-penyserapan-832852>
- Lestyowati, Jamila. (2015, Mei 07). Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Haruskah Swakelola? Diakses dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/id/publikasi/artikel/>
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nelwan dan Mawikere. (2015). Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung. *Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.297-307*. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/>
- Nurhajanti, Nashirotn Nisa. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol.18 No.2*. Diakses dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/>
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2015). *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa*. Diakses dari Pemerintah Kecamatan Ajibarang.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2017). *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017*. Diakses dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- Prier and Mc.Cue. (2009). The Implications of A Muddled Definition of Public Procurement. *Journal Of Public Procurement, Volume 9, Issues 3 & 4*, 326-370. Diakses dari <http://ippa.org/jopp/download/>
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa*. Diakses dari <https://e-catalog.lkpp.go.id/m/7/regulasi-dokumen>
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa*. Diakses dari <https://peraturan.go.id/>
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. Diakses dari <https://kpd.or.id/2017/09/23/permendesa-no-4-tahun-2017-berkaitan-4-program-prioritas-kementerian-des/>
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Di akses dari <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan-dana-des/>
- Siswanto dan Rahayu. (2011). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/ Lembaga TA. Kementerian Keuangan. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_dan_opini/kementerian_lembaga.pdf/
- Sudrajat, Abi. (2017, Desember 23). Proyek Dana Desa Wajib Dilakukan Secara Swakelola. Diakses dari <https://eproc.lkpp.go.id/news/>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widiyatno, Eko. (2017, November 4). Dana Desa Tahap II Di Banyumas Belum Bisa Dicairkan. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/>